Jurnal Tapak Melayu
Vol.04 No.01. April 2026
DOI : https://doi.org/10.56783/tm.v4i01.449
Available online at https://jurnal.stainatuna.org/index.php/tapakmelayu

Kebijakan Kurikulum Nasional antara Kepentingan Politik dan Pendidikan

Novita Atfirianty[1], Hasmiza[2]
Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna
Email : novita8738@gmail.com[1] , hasmiza.almaarif.@gmail.com[2]

Received : 24 Maret, 2026
Revised : 20 April, 2026
Accepted : 28 April, 2026

Abstrak

Artikel ini di tulis dengan tujuan untuk melihat bagaimana kepentingan politik berperan dalam pembentukan kurikulum nasional dan bagaimana hal itu berdampak pada kualitas pendidikan. Metode yang digunakan adalah melakukan penelitian literatur atau studi pustaka dengan melihat berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan politik pendidikan dan kebijakan kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika tidak diimbangi dengan pendekatan pedagogis yang tepat, dominasi kepentingan politik dapat mengubah tujuan pendidikan utama. Oleh karena itu, kepentingan politik dan pendidikan harus diimbangi melalui proses perumusan kebijakan yang partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan nyata. Oleh karena itu, kurikulum nasional diharapkan dapat berfungsi sebagai alat strategis untuk meningkatkan pendidikan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kata kunci: *Politik Pendidikan, Kurikulum Nasional, Kebijakan Kurikulum, Kualitas Pendidikan, Kepentingan Politik*

Pendahuluan

Secara istilah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kurikulum mencerminkan nilai-nilai sosial, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang harus diantisipasi dalam pendidikan (Sapitri, 2025).

Di Indonesia, perubahan kurikulum sering menarik perhatian publik, terutama ketika perubahan tersebut dikaitkan dengan kebijakan politik yang kuat. Pada dasarnya, kurikulum adalah suatu rencana pendidikan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Namun, dalam kenyataannya, perubahan kurikulum tidak selalu didasarkan pada kebutuhan pendidikan. Sebaliknya, tren global dan kepentingan politik yang dominan sering mempengaruhinya. Kurikulum 2013, yang dimulai oleh Kementerian

DOI : https://doi.org/10.56783/tm.v4i01.449
Available online at https://jurnal.stainatuna.org/index.php/tapakmelayu

Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013, adalah contoh dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem pendidikan negara dengan tuntutann dunia (Permendikbud No. 61 Tahun 2014).(A. E. H. Nurdin, 2026) Sejak kemerdekaan, kurikulum Indonesia telah berubah berkali-kali. Ini termasuk kurikulum 1947 hingga Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Kurikulum 2013, di sisi lain, dibuat pada tahun 2013 sebagai tanggapan terhadap kekurangan kurikulum sebelumnya, yang dianggap terlalu menekankan aspek kognitif daripada membangun karakter dan keterampilan berpikir kritis (Izzah, 2025).

Perubahan ini adalah hasil logis dari perubahan dalam struktur politik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi di masyarakat internasional. Oleh karena itu, kurikulum sebagai program pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Kurikulum selalu mengalami perubahan dan penyempurnaan karena berbagai alasan. (Andrea, 2016). Tujuan pendidikan dapat sepenuhnya berubah saat sebuah negara menjadi negara merdeka. Kurikulum berfungsi sebagai sumber dan alat untuk mencapai tujuan akademik. Kurikulum menunjukkan dasar atau pandangan hidup negara, dan kurikulum akan menentukan gaya hidup yang akan digunakan negara. Kebijakan pendidikan harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara serta membantu membangun masyarakat yang terampil, bermanfaat, demokratis, damai, berkeadilan, dan berdaya saing tinggi untuk mencapai masyarakat yang berwawasan global (Nisa & Hamami, 2023).

Kebijakan sangat penting untuk menghasilkan keputusan, program, dan hasil lainnya sesuai dengan nilai-nilai para aktor pengambil keputusan; namun, kebijakan juga dapat menghasilkan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, seperti dominasi dan proses yang tidak berkembang. Kosanke (2019) Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering dibicarakan, dikatakan, atau dilakukan tetapi seringkali tidak dipahami dengan benar. Untuk membuat kebijakan, akal sehat dan kebutuhan lapangan adalah pertimbangan utama. Kebijakan jelas merupakan hasil dari pikiran manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Kebijakan kadang-kadang bergantung pada emosi dan irasional, meskipun pemikiran manusia paling penting dalam pengambilan keputusan (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat & Made Suraharta, 2024).

Baik berkembang maupun maju, pendidikan dan politik sangat penting untuk struktur sosial politik negara. Kedua orang tampaknya tidak berhubungan satu sama lain

DOI : https://doi.org/10.56783/tm.v4i01.449
Available online at https://jurnal.stainatuna.org/index.php/tapakmelayu

karena mereka selalu terpisah satu sama lain. Terlepas dari kenyataan bahwa keduanya sangat terkait satu sama lain. Pendidikan sangat penting karena tanpanya tidak mungkin bagi seseorang untuk mengelola politik dan pemerintahan. Karena kekurangan sarana dan prasarana, kebijakan yang mendukung pendidikan, dan pengelolaan keuangan negara, pendidikan tidak dapat berlangsung tanpa politik.Pendidikan politik sangat penting untuk membangun karakter generasi muda agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab, aktif, dan berpikir kritis. Di negara demokrasi, anak-anak diharapkan dapat memahami dan memahami politik sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses perumusan kebijakan public (Jian & Shuang, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang bagaimana kebijakan pendidikan nasional dirancang dan diterapkan untuk menangani masalah ini sangat penting. Dengan kata lain, selain pendekatan kurikulum, penguatan karakter Islami membutuhkan kebijakan yang sistematis, terarah, dan menyeluruh. Penelitian ini sangat penting karena perlu untuk mengevaluasi seberapa besar kebijakan kebijakan pendidikan nasional mendukung penguatan karakter Islami di sekolah (Faisal et al., 2025).

Untuk membuat generasi muda menjadi warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab, pendidikan politik sangat penting. Dalam demokrasi, anak-anak diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses perumusan kebijakan publik. Di tengah dinamika sosial dan politik yang kompleks di Indonesia, pendidikan politik telah menjadi alat strategis untuk mengurangi apatisme politik, terutama di kalangan generasi muda (Anugrah et al., 2021). Akibatnya, tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kebijakan kurikulum nasional. Mereka menemukan kesulitan dan kesulitan dalam menerapkan kebijakan tersebut pada awal kemerdekaan Indonesia. Mereka juga mempelajari relevansi dan konsekuensi kebijakan tersebut untuk membangun sistem pendidikan nasional yang kuat (Anam & Solihah, 2024).

Pembahasan

Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 29 dan Amandemennya, secara eksplisit mengatur sistem pendidikan di Indonesia.Semua orang harus mendukung pendidikan, dan negara harus membantunya. Namun demikian, amanat tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam bidang pendidikan hingga saat ini, yang dianggap masih jauh dari tujuan.Meskipun demikian, dari sisi pendanaan tahun 2009, pemerintah telah

Jurnal Tapak Melayu
Vol.04 No.01. April 2026
DOI : https://doi.org/10.56783/tm.v4i01.449
Available online at https://jurnal.stainatuna.org/index.php/tapakmelayu

menargetkan anggaran 20% dari APBN7. Kita tahu bahwa politik negara sangat memainkan peran dalam menentukan arah perkembangan pendidikan negara karena hubungan antara politik dan pendidikan selalu terkait.Banyak ahli berpendapat bahwa salah satu cara untuk melestarikan kekuasaan negara adalah melalui pendidikan. lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk menyebarkan politik budaya negara, sehingga sistem kekuasaan atau keinginan politik negara disebarkan melalui lembaga pendidikan. Penulis berpendapat bahwa hubungan antara sistem politik dan kebijakan pendidikan sangat kuat dan berdampak pada kebijakan pendidikan secara keseluruhan. Muhammad Sirozi, "Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia", mengatakan bahwa hubungan antara sistem politik dan kebijakan pendidikan sangat kuat dan berdampak pada seluruh negara (Muharnis1, n.d.).

Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk mempertahankan pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya untuk generasi berikutnya.Karena Indonesia telah berkembang dengan cepat sejak tahun 1968, banyak hal telah berubah yang memberikan dampak baru pada program pendidikan negara. Kurikulum tahun 1968 mengandung elemen yang merupakan bagian dari kebijakan pembangunan nasional yang berkembang saat itu. Akibatnya, kurikulum harus disesuaikan untuk memenuhi persyaratan masyarakat yang sedang berkembang.Pertimbangan ini membentuk kurikulum tahun 1975.Pemerintahan Orde Baru melakukan segala upaya untuk mencapai rencana pembangunan melalui program pelitakan repelita. Pendidikan dan politik saling mempengaruhi.

Pendidikan selalu dikaitkan dengan politik, begitu juga sebaliknya. Hubungan antara politik dan pendidikan tidak diakui dan didukung oleh semua pihak. Di banyak negara berkembang yang terkena dampak modernisasi, pola hubungan antara pendidikan dan politik telah berubah dari tradisional ke modern dalam masyarakat yang lebih maju dan berorientasi teknologi, serta mengadopsi institusi dan prinsip Barat (Baru & Suhandi, 2022). Kurikulum biasanya merupakan rencana yang mencakup berbagai topik dan materi yang akan diajarkan oleh guru atau dipelajari siswa (Zainuri, 2018). Kurikulum biasanya dianggap orang tua sebagai latihan atau pekerjaan rumah untuk anak-anak mereka. Bagi siswa, kurikulum berarti garis besar materi pelajaran (materi pelajaran) yang harus dipelajari siswa serta pendekatan, metode, atau teknik mengajar dan sumber daya belajar (Dhomiri, 2023). Seiring dengan perkembangan globalisasi, kehidupan masyarakat menjadi lebih maju dan modern. Lembaga pendidikan harus terus berubah untuk memenuhi

DOI : https://doi.org/10.56783/tm.v4i01.449
Available online at https://jurnal.stainatuna.org/index.php/tapakmelayu

kebutuhan masyarakat seiring kemajuan. Institusi pendidikan dapat berkembang melalui kebijakan pendidikan. Institusi pendidikan dapat memberikan kebebasan kreatif kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan minat mereka sendiri (Muharnis, 2023).

Kurikulum harus diubah untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang berbeda dan meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendidikan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan dan moralitas yang tinggi. Herlambang (2016) menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan sangat penting karena melaluinya sebuah negara dapat membangun sebuah komunitas yang berbudaya, fleksibel, progresif, dan memiliki kepribadian yang berbasis budaya.

Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi meluncurkan kurikulum merdeka, yang juga disebut sebagai kurikulum prototipe, sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Kurikulum baru ini dirancang untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi sejak awal dengan menggunakan teknologi yang tersedia, karena tujuan kurikulum adalah untuk memuliakan kembali harkat dan martabat pendidikan karena pandemi COVID-19 telah menyebabkan ketidakmaksimalan dalam belajar (Learning Loss) dan kurang optimalnya pembelajaran (Suhandi, 2022).

Salah satu konsekuensi dari kebijakan di atas adalah pentingnya kebijakan kurikulum yang fleksibel. Pembelajaran di luar kelas akan membentuk karakter siswa dengan memberi mereka keberanian untuk menyuarakan pendapat mereka dalam diskusi, meningkatkan kemampuan mereka, dan membangun hubungan sosial yang baik. Kurikulum belajar merdeka mempertimbangkan pengetahuan dan kemampuan siswa bukan hanya berdasarkan nilai; itu juga mempertimbangkan kemampuan dan keahlian siswa dalam bidang ilmu tertentu (Nasution et al., 2023).

Karena arah pembangunan pendidikan negara sangat ditentukan oleh politik negara. Banyak ahli percaya bahwa pendidikan adalah cara untuk mempertahankan kekuasaan negara. Michael W. Apple mengatakan dalam Tilaar bahwa lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk menyebarkan politik budaya negara, yang berarti kekuasaan atau keinginan politik menyebar dalam sistem Pendidikan (Ulyani et al., 2023). Kita tahu bahwa politik negara sangat memainkan peran dalam menentukan arah perkembangan pendidikan negara karena hubungan antara politik dan pendidikan selalu terkait.Banyak ahli berpendapat bahwa salah satu cara untuk melestarikan kekuasaan negara adalah melalui pendidikan.MichaelW. Apple menjelaskan dalam Tilaar bahwa institusi pendidikan

DOI : https://doi.org/10.56783/tm.v4i01.449
Available online at https://jurnal.stainatuna.org/index.php/tapakmelayu

bertanggung jawab untuk menyebarkan politik budaya negara, yang berarti sistem kekuasaan atau keinginan politik negara menyebar melalui institusi Pendidikan (Muharnis1, n.d.).

Anggaran pendidikan juga dipengaruhi oleh politik Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.Menurut Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, fakta dan praktik yang mendukung pendidikan mewajibkan negara untuk memprioritaskan anggaran untuk pendidikan hingga 20% dari APBN/APBD. Pada kenyataannya, gaji guru dan pengeluaran lainnya merupakan bagian dari anggaran tersebut.Fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, lapangan olahraga, dan lainnya tidak memenuhi syarat karena kurangnya dana untuk Pendidikan (Kosanke, 2019). Salah satu kebijakan yang dapat diadopsi adalah penyediaan anggaran khusus untuk pengembangan infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah berbasis Islam, termasuk di daerah terpencil. Ketersediaan perangkat teknologi, jaringan internet, dan pelatihan sumber daya manusia perlu menjadi prioritas agar tidak ada kesenjangan dalam implementasi kurikulum ini. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada institusi pendidikan yang berhasil mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menjadi model bagi institusi lainnya. Lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan era digital, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keislaman. Kurikulum ini harus dirancang secara fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa yang beragam, baik dari segi latar belakang sosial, budaya, maupun kemampuan teknologi. Institusi pendidikan juga perlu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga penelitian, pengembang teknologi, dan organisasi masyarakat, untuk memastikan keberlanjutan program ini (Hasmiza, 2025).

Sejarah politik pendidikan Indonesia penuh dengan peristiwa yang berbeda. Politik pendidikan selama penjajahan berpusat pada kemerdekaan negara, jadi pendidikan adalah untuk melawan penjajah. Satu-satunya tempat di dunia yang diakui oleh UNESCO adalah Taman Siswa karena merupakan instruksi yang diberikan kepada siswa selama masa penjajahan untuk melawan penjajah. Bahkan, kebijakan pendidikan negara kita telah memungkinkan orang dari negara lain untuk belajar di sini. Tidak peduli seberapa cepat, akan terjadi invasi nilai yang akan menimbulkan perselisihan dengan nilai-nilai asli Indonesia. Ini tidak menguntungkan karena tidak mendukung pengaktualan Undang-Undang Dasar dan Pancasila.

Jurnal Tapak Melayu
Vol.04 No.01. April 2026
DOI : https://doi.org/10.56783/tm.v4i01.449
Available online at https://jurnal.stainatuna.org/index.php/tapakmelayu

Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, fisik (tanah, air, dan udara), formal (hukum), dan informal (sosial-budaya) (Istilah kunci:, n.d.). Pendidikan sangat memengaruhi pola pikir masyarakat dan kesadaran politik mereka. Pendidikan yang baik mengajarkan orang untuk berpikir kritis, memahami hak-hak mereka, dan berpartisipasi aktif dalam sistem politik. Pendidikan adalah dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan demokrasi, meningkatkan kesadaran sosial, dan terlibat dalam kehidupan politik, yang membuat hubungan ini sangat penting (Rasjid et al., 2024). Salah satu efek paling jelas dari pengaruh pendidikan terhadap politik adalah tingkat partisipasi politik masyarakat. Negara-negara dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki partisipasi politik yang lebih tinggi (Yumna et al., 2025).

Nasution (1989) menyatakan bahwa konteks sosial dan politik yang lebih luas selalu mendukung kebijakan pendidikan. Karena perubahan rezim pemerintahan seringkali diikuti dengan perubahan kurikulum yang membawa visi dan misi politik tertentu, tidak selalu didasarkan pada penelitian akademik yang mendalam.Untuk mengatasi tantangan globalisasi dan disrupsi teknologi, revitalisasi kurikulum pendidikan Islam kontemporer sangat penting. Abidin Perubahan Kurikulum, Idealitas, Trend, Persaingan Global, dan Kepentingan Politik di Indonesia menekankan bahwa pendidikan Islam harus menggabungkan prinsip Islam dengan pendekatan kontekstual, keterampilan modern, dan teknologi digital. Kurikulum bebas memungkinkan nilai-nilai Islam diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis keterampilan dan praktik (A. E. H. Nurdin, 2026).

Fokus pendidikan politik Pertama, pendidikan politik membantu semua orang memahami dan mengidentifikasi dasar sistem politik yang ada. Kedua, pendidikan politik membantu semua orang menjadi warga negara yang lebih sadar politik, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawab kewarganegaraan mereka dengan mengubah perspektif dan berpartisipasi lebih banyak. Nasiwan berpendapat bahwa pendidikan politik sangat penting untuk mereka yang sudah tahu tentang masalah politik dan mereka yang belum memahaminya. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa individu dengan pengetahuan politik yang luas dan mendalam dapat menjadi acuh tak acuh terhadap tindakan politik. Hal ini juga disebabkan oleh frustrasi dan ketidakpuasan dengan keadaan politik yang tidak ideal (Achmad et al., 2024). Pendidikan bukan hanya pendidikan, tetapi juga pembentukan kepercayaan dan pandangan dunia. Kasus ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai alat yang sangat kuat untuk

DOI : https://doi.org/10.56783/tm.v4i01.449
Available online at https://jurnal.stainatuna.org/index.php/tapakmelayu

mendukung agenda politik pemerintahan dan juga menunjukkan seberapa besar kepentingan politik penguasa dapat memengaruhi kebijakan Pendidikan (Khamim et al., 2027).

Selain itu, pendidikan memengaruhi kemajuan masyarakat. Pendidikan memberikan fondasi yang kuat untuk kemajuan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Pendidikan memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, demokratif, dan berkelanjutan. Selain itu, melalui pengawasan pendidikan, masyarakat dapat menghasilkan sumber daya manusia yang terampil, kreatif, dan produktif (Faratunnisa & Afifah, 2024).

Ada kemungkinan integrasi dalam hal hubungan antara kedua entitas ini. Dalam situasi seperti itu, agama dapat secara bebas diintegrasikan ke dalam struktur politik negara. Hukuman dan kebijakan negara-negara yang berdasarkan agama, seperti negara Islam atau negara-negara berdasarkan agama lainnya, mengikuti ajaran agama mereka. Pemimpin agama atau lembaga keagamaan memiliki Dinamika Hubungan Politik dan Pendidikan di Kampus. Mereka berada di antara keseimbangan dan konflik, dan mereka memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik (A. Nurdin & Humaeroh, 2023)

Penutup

Dijelaskan bahwa dua tujuan utama kepentingan politik dan pendidikan ditempatkan dalam kebijakan kurikulum nasional. Ideologi, visi pembangunan, dan agenda kekuasaan selalu memengaruhi kurikulum dalam praktiknya. Hal ini wajar karena pemerintah berperan sebagai aktor utama dalam sistem pendidikan nasional, dan kebijakan publik mencakup kurikulum. Namun, terlalu banyak kepentingan politik dapat mengubah tujuan pendidikan utama, yaitu menumbuhkan potensi siswa, membentuk karakter mereka, dan membekali mereka dengan kemampuan untuk menghadapi tantangan zaman.

Sejarah program pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa perubahan politik seringkali mengikuti perubahan program. Kurikulum sering diubah saat rezim atau kebijakan nasional berubah, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pendidikan di lapangan. Jadi, sebagai pelaksana utama kurikulum di kelas, guru harus terus beradaptasi dengan perubahan yang tidak selalu dipahami atau didukung oleh sumber daya yang memadai. Dalam keadaan seperti ini, kurikulum mungkin hanya berfungsi sebagai

DOI : https://doi.org/10.56783/tm.v4i01.449
Available online at https://jurnal.stainatuna.org/index.php/tapakmelayu

dokumen administratif daripada berfungsi sebagai pedoman pedagogis yang benar-benar efektif dalam pembelajaran.

Kurikulum sebaliknya harus dibuat berdasarkan landasan ilmiah, kebutuhan siswa, dan kemajuan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan karena pentingnya pendidikan. Kurikulum yang baik harus relevan dengan masa depan, kontekstual, dan fleksibel. Pendekatan pedagogis yang menekankan kreativitas, pembelajaran aktif, berpikir kritis, dan penguatan karakter harus menjadi prioritas utama dalam setiap perencanaan kurikulum. Akibatnya, pendidikan tidak hanya mendistribusikan informasi, tetapi juga menciptakan individu yang kuat dan kompetitif.

Oleh karena itu, kepentingan politik dan pendidikan harus diimbangi dalam kebijakan kurikulum nasional. Kesesuaian ini dapat dicapai melalui proses perumusan kebijakan yang transparan, berbasis data, dan melibatkan orang-orang. Sangat penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, guru, praktisi pendidikan, dunia industri, dan masyarakat luas, untuk memastikan bahwa kurikulum yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan di lapangan. Selain itu, evaluasi kurikulum harus dilakukan secara objektif dan berkelanjutan sehingga perubahan yang dilakukan didasarkan pada temuan penelitian, bukan pertimbangan politik.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan karena mereka memiliki otoritas utama untuk menetapkan kurikulum. Kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan legitimasi politik dan kualitas pendidikan dalam jangka panjang. Stabilitas kebijakan adalah elemen penting yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa implementasi kurikulum berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Meskipun kurikulum perlu diubah, itu harus dilakukan secara bertahap dan disertai dengan dukungan yang memadai, seperti peningkatan sistem evaluasi, pelatihan guru, dan penyediaan sarana dan prasarana.

Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa politik dan pendidikan saling berhubungan. Sistem politik yang saat ini dipimpin oleh pemerintah harus selalu digunakan untuk memperluas sistem pendidikan. Oleh karena itu, setiap masalah yang muncul di bidang pendidikan yang memerlukan intervensi pemerintah untuk menyelesaikannya pada akhirnya akan mengarah pada masalah politik. Fokus pendidikan politik Pertama, pendidikan politik membantu semua orang memahami dan mengidentifikasi dasar sistem politik yang ada. Kedua, pendidikan politik membantu semua orang menjadi warga negara

DOI : https://doi.org/10.56783/tm.v4i01.449
Available online at https://jurnal.stainatuna.org/index.php/tapakmelayu

yang lebih sadar politik, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawab kewarganegaraan mereka dengan mengubah perspektif dan berpartisipasi lebih banyak (Achmad et al., 2024)

Peran guru sebagai pusat implementasi kurikulum harus diingat. Guru bukan hanya orang yang memenuhi kebijakan tetapi juga orang yang paling dekat dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, pendapat dan pengalaman guru harus dimasukkan ke dalam proses pembuatan dan evaluasi kurikulum. Ini akan membuat kebijakan kurikulum lebih masuk akal, relevan, dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Agar guru dapat memanfaatkan kurikulum dengan cara yang inovatif dan efektif, peningkatan kompetensi guru harus menjadi prioritas utama.

Peran guru sebagai pusat pelaksanaan kurikulum harus diperhatikan. Guru bukan hanya orang yang mematuhi kebijakan tetapi juga orang yang paling dekat dengan siswa. Akibatnya, pendapat dan pengalaman guru harus dimasukkan ke dalam proses pembuatan dan evaluasi kurikulum. Ini akan membuat kebijakan kurikulum lebih masuk akal, relevan, dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Peningkatan kompetensi guru harus menjadi prioritas utama jika guru ingin memanfaatkan kurikulum dengan cara yang inovatif dan efektif.

Oleh karena itu, kebijakan kurikulum nasional yang ideal memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan politik sambil mempertahankan tujuan pedagogisnya. Tujuan negara, tujuan pemerintah, dan harapan masyarakat harus dikaitkan dengan kurikulum. Kurikulum akan menjadi sumber yang kuat untuk pembangunan sumber daya manusia yang unggul jika keseimbangan ini dapat dicapai. Akibatnya, pendidikan sangat penting untuk membangun masa depan negara yang lebih adil, berkelanjutan, dan lebih baik.

Fleksibilitas kurikulum tidak berarti kehilangan arah atau identitas karena perubahan global seperti kemajuan teknologi, transformasi ekonomi, dan tantangan sosial dan lingkungan. Kurikulum yang responsif dapat membantu siswa lebih dari sekedar belajar; itu dapat membantu mereka berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan bekerja sama. Pemerintah, tenaga pendidik, akademisi, dunia industri, dan masyarakat luas harus bekerja sama untuk menetapkan standar pendidikan. Dengan bekerja sama, kurikulum akan lebih sesuai dengan kebutuhan industri daripada hanya menjadi dokumen formal. Kerja sama ini juga akan membantu memastikan bahwa lulusan pendidikan memiliki

kemampuan yang sesuai dengan masyarakat dan dunia kerja. Kurikulum juga harus didukung oleh jumlah guru yang memadai. Selain menjadi guru, guru adalah penggerak perubahan yang bertanggung jawab untuk mengubah kebijakan menjadi praktik pendidikan yang menguntungkan. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan guru melalui pelatihan berkelanjutan, akses ke sumber belajar, dan dukungan profesional sangat penting. Tanpa guru yang fleksibel dan terampil, kurikulum yang baik sekalipun tidak dapat mencapai hasil yang optimal.

Sebaliknya, evaluasi kurikulum juga harus dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi apakah kurikulum efektif dan relevan. Evaluasi ini harus komprehensif dan mencakup hasil belajar siswa, proses pembelajaran, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan melakukan evaluasi ini, kebijakan kurikulum dapat terus diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, kurikulum yang paling baik berfokus pada pencapaian akademik selain membangun karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan harus mengajarkan toleransi, tanggung jawab, integritas, dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Akibatnya, kurikulum tidak hanya mencetak siswa yang cerdas, tetapi juga siswa yang bermoral dan berkontribusi positif kepada masyarakat.

Kurikulum nasional dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun generasi yang siap menghadapi berbagai tantangan dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Agar sistem pendidikan tetap relevan dan berdampak nyata, keseimbangan antara tujuan pendidikan, kepentingan politik, dan kebutuhan masyarakat harus dijaga. Pada akhirnya, keberhasilan kurikulum akan tercermin dari kualitas manusia yang dihasilkan, yang memiliki kemampuan untuk membawa bangsa menuju kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan.

Rujukan

Achmad, A., Mulia, M., & Terbuka, U. (2024). *JURNAL LOCUS : Penelitian & Pengabdian Pendidikan Politik dan Manfaat Peranannya Di Masyarakat*. *3*(6), 515–532. https://doi.org/10.58344/locus.v3i6.2867

Anam, M. S., & Solihah, M. (2024). Memahami Kebijakan Kurikulum Nasional Tahun 1947 dan 1952. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(8), 9313–9317. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i8.5271

Anugrah, S., Jalinus, N., Abdullah, R., Mudjiran, M., Austin, D. A., & Rayendra, R. (2021). Peran Politik Terhadap Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum. *Pedagogi:*

Jurnal Ilmu Pendidikan, *21*(2), 139–143. https://doi.org/10.24036/pedagogi.v21i2.1135

Baru, K. K., & Suhandi, A. M. (2022). *Jurnal basicedu*. *6*(4), 5936–5945.

Dhomiri, A. (2023). *Konsep Dasar dan Peranan serta Fungsi Kurikulum dalam Pendidikan*. *3*(1), 118–128.

Faisal, F., KUSUMA, K. A., Jalal, J., & NASARUDDIN, N. (2025). Politik Kebijakan Pendidikan Nasional Dalam Penguatan Karakter Islami Di Sekolah. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, *10*(3), 1293–1305.

Faratunnisa, A. N., & Afifah, N. (2024). *Kajian Makna Sistem dalam Fondasi Pendidikan Nasional Indonesia*. *2*(02).

Hasmiza. (2025). *Model Kurikulum Pendidikan Islam Di Era Digital : Mengoptimalkan Teknologi Untuk*. *11*(1), 164–177.

Izzah, N. (2025). *Politik Kurikulum PAI : Analisis Kekuasaan Foucault dalam Perubahan Kebijakan Pendidikan Islam 2000-2025*. *1*(2), 98–112.

Jian, Z., & Shuang, L. (2024). *赵建1，2梁爽1，2*. *4*, 67–75.

Khamim, S., Siregar, N., & Yaldi, Y. (2027). *Pengaruh Dan Tantangan Pendidikan Agama Islam Dalam Dinamika Politik Di Indonesia*. *4*, 2027–2042.

Kosanke, R. M. (2019). Kekuatan Politik dalam Pembentukan Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal UINSGD*, *2*(2), 133–146.

Muharnis1, F. (n.d.). *Jurnal Menata : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam STAI YAPTIP Pasaman Barat Jurnal Menata : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 76–86.

Muharnis1, F. (2023). *Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Nasional*. *6*(1), 49–59.

Nasution, A. F., Ningsih, S., Silva, M. F., & Suharti, L. (2023). *COMPETITIVE : Journal of Education Konsep Dan Implementasi Kurikulum Merdeka*. *2*(3), 201–211.

Nisa, F. I., & Hamami, T. (2023). Evaluasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *9*(3), 1374–1386.

Nurdin, A. E. H. (2026). *Perubahan Kurikulum, Idealitas, Trend , Persaingan Global dan Kepentingan Politik di Indonesia Ahmad*. (61).

Nurdin, A., & Humaeroh, E. (2023). *Dinamika Hubungan Politik dan Pendidikan Agama di Kampus : antara Keseimbangan dan Konflik*. *1*(4).

DOI : https://doi.org/10.56783/tm.v4i01.449
Available online at https://jurnal.stainatuna.org/index.php/tapakmelayu

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *No Title 済無No Title No Title No Title*. *2*, 306–312.

Sapitri[1], H. (2025). *Peran Aliran-Aliran Filsafat Dalam Pengembangan Kurikulum*. *03*(02), 34–48.

Ulyani, A. S., Fikasari, A. Y., Fauzi, A., & Asiah, T. (2023). *1 2 3 4*. *1*, 206–213.

Yumna, H., Auliya, I., Fauziah, S., Abida, E., & Fauzi, A. (2025). *Hubungan Timbal Balik Politik dengan Pendidikan*. *8*, 9154–9160.